

Workshop Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Pendekatan Alternatif Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Regional Planning and Budgeting Workshop: An alternative approach to Capacity Building for Regional Financial Managers in Pangkajene dan Kepulauan Districts

¹Mursalim Nohong, ¹Abdullah Sanusi, ¹Insany Fitri Nurqamar, ¹Wahda,
²Alimuddin, ²Andi Kusumawati, ³Sabir

¹Departemen Manajemen FEB UNHAS Makassar

²Departemen Akuntansi FEB UNHAS Makassar

³Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNHAS Makassar

Korespondensi: M. Nohong, mursalim1906nohong@gmail.com

Naskah Diterima: 17 Nopember 2017. Disetujui: 27 Desember 2019. Disetujui Publikasi: 14 Januari 2021

Abstract: Planning and budgeting is a strategic first step in realizing regional financial management that is oriented towards improving the welfare of the community. To make it happen, we need human resources who have the ability and skills to analyze regional strategic problems and put them into a design program and activities accompanied by funding capabilities. This study aims to improve the knowledge and skills of regional financial managers, especially in the areas of regional planning and budgeting. This activity is carried out in the form of a workshop so that each participant can immediately gain knowledge and skills as well as approaches in solving every case faced. Planning and budgeting workshops for Regional Work Units within the scope of the Pangkajene and Islands Regency governments are a solution that is considered effective in resolving these problems. The workshop was attended by 60 State Civil Servants who have the main tasks and functions of planning and budgeting in each regional apparatus organization. Activities will be carried out using a Participative approach and accompanied by a discussion of real cases that have occurred in each SKPD. The results of the study indicate that some of the problems faced by the Pangkajene and Islands Regency governments are 1) planning resources are still limited, 2) most of the Musrenbang processes are still in the form of compiling a shopping list of activities. 3) the RPJPD to RPJMD and RPJMD to RKPD breakdowns often do not match.

Keywords: *Planning, budgeting, workshop, performance-based budgeting.*

Abstrak: Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah awal yang sifatnya strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis permasalahan strategis daerah dan menuangkannya dalam sebuah rancangan program dan kegiatan yang disertai dengan kemampuan pendanaan. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan daerah khususnya dalam bidang perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop agar setiap peserta

dapat langsung memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian setiap kasus yang dihadapi. Workshop perencanaan dan penganggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi solusi yang dianggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud. Workshop diikuti oleh 60 Aparatur Sipil Negara yang memiliki tupoksi dalam bidang perencanaan dan penganggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. Kegiatan akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif (*Participative approach*) dan disertai dengan pembahasan kasus-kasus riil yang terjadi di masing-masing SKPD. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 1) masih terbatasnya sumberdaya perencana, 2) proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (*shopping list*) kegiatan. 3) breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (*match*).

Kata Kunci: *Perencanaan, penganggaran, workshop, anggaran berbasis kinerja.*

Pendahuluan

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan elemen penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD). Untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat manajemen keuangan di sektor pemerintahan lebih mengedepankan aspek ketaatan terhadap peraturan dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan kemakmuran rakyat (*stakeholders*). Fenomena ini berbeda dengan manajemen keuangan di sektor privat yang selalu mengedepankan aspek teori dan pendekatan *the best practice* dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan perolehan laba bagi para pemiliknya (*stockholders*).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dengan tegas *mendefinisikan* lingkup keuangan daerah yang merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah tersebut secara operasional dijabarkan ke dalam ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi: a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, c) penerimaan daerah, d) pengeluaran daerah, e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan perencanaan/penganggaran merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang memiliki makna krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dalam satu tahun anggaran yang direncanakan (Alimuddin & Safitri, 2004).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur perencana dalam menyusun program dan kegiatan yang berbasis pada anggaran kinerja. Manfaat yang diharapkan adalah kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik sehingga program dan kegiatan yang direncanakan tepat sasaran dan memiliki manfaat bagi masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini dilaksanakan di Pangkajene Ibu Kota Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 23 – 26 Oktober 2017.

Khalayak Sasaran. Wokshop diikuti oleh 60 (enam puluh) aparatur sipil negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tupoksinya sebagai perencana di masing-masing SKPD.

Metode Pengabdian. Seluruh materi pada kegiatan workshop ini disampaikan dalam bentuk ceramah yang disertai dengan studi kasus.

Metode Evaluasi. Pada awal kegiatan dilakukan pre test diperoleh nilai rerata sebesar 89 dan meningkat menjadi 96 setelah dilakukan post test.

Hasil dan Pembahasan

A. Persiapan kegiatan

Kegiatan persiapan sebelum pelaksanaan bertujuan untuk menjamin efektifitas rencana yang disusun melalui kesepakatan antara tim pengabdian, narasumber dan mitra pengabdian masyarakat. Persiapan kegiatan diantaranya dalam bentuk pertemuan antara tim pengabdian dengan mitra untuk membicarakan teknis kegiatan. Rincian persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pertemuan awal antara tim pengabdian dengan mitra untuk meminta kesediaan waktu dan alokasi peserta. Adapun waktu yang disepakati adalah tanggal 23 – 26 Oktober 2017 dan bertempat di Aula Kantor Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Pertemuan dengan tim pengabdian untuk melakukan koordinasi dan pembagian kerja termasuk dengan para narasumber. Pada pertemuan itu disepakati materi, narasumber, alokasi waktu dan model pembelajaran yang digunakan.

B. Workshop perencanaan dan penganggaran

Workshop dipilih sebagai metode dalam pemecahan masalah perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks. Masih minimnya pengetahuan terkait dengan isu-isu perencanaan dan penganggaran terkini serta keterampilan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang didasarkan pada hasil musyawarah dan telaah permasalahan masyarakat menjadi salah satu materi yang harus dikuasai dengan baik oleh aparatur sipil negara perencanaan pada setiap SKPD.

B.1 Jumlah peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 60 (enam puluh) aparatur sipil negara dari seluruh SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Gambar 1. Suasana penyampaian materi

B.2 Ketercapaian tujuan

Berdasar pada nilai pre test dan post test diperoleh hasil yang cenderung meningkat. Rerata nilai pre test sebesar 89 dan meningkat menjadi 96 setelah dilakukan post test.

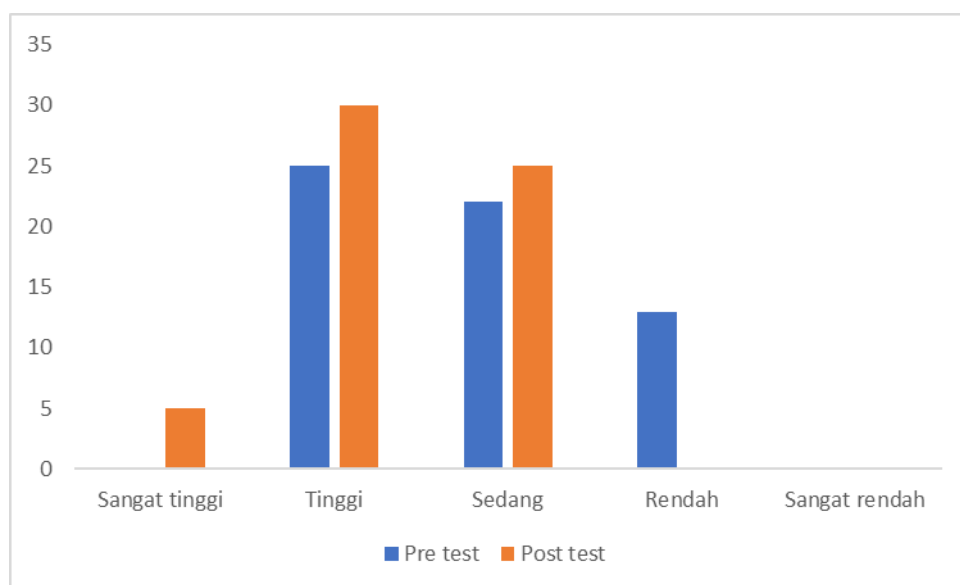
B.3 Ketercapaian materi

Penyampaian materi terlaksana seperti yang telah direncanakan. Hanya saja keterbatasan waktu dan jumlah permasalahan yang sifatnya kompleks tidak memungkinkan untuk membahas materi secara terperinci meskipun dikombinasikan dengan studi kasus. Adapun materi yang disampaikan pada saat workshop adalah sebagai berikut:

- a. Konsep Perencanaan dan Penganggaran
Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang konsep perencanaan dan beberapa dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran
Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang keterkaitan perencanaan dan penganggaran
- c. Anggaran Berbasis Kinerja
Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menyusun anggaran berbasis kinerja
- d. Analisis Standar Belanja
Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menyusun dan menganalisis belanja dalam kaitannya dengan standar yang telah ditetapkan
- e. Penyusunan RKA
Materi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- f. Studi Kasus

B.4 Keberhasilan Kegiatan

Pengukuran tingkat kemampuan peserta terhadap penguasaan materi dilakukan dengan pretest dan post-test. Hasil kuesioner yang dibagikan menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran.



Gambar 2. Rekapitulasi rerata nilai pre dan post test

Kesimpulan

Kegiatan workshop perencanaan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan nilai test masing-masing peserta.

Referensi

- Alimuddin & Safitri, W. (2004). Modul Perencanaan dan Penganggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Mursalim. (2016). Bahan Ajar Perencanaan dan Penganggaran. Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- (2017). Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (2017). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tim penulis

Mursalim Nohong, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: mursalimnohong@fe.unhas.ac.id

Abdullah Sanusi, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: abdullah.sanusi@gmail.com

Insany Fitri Nurqamar, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: insanyfitri@gmail.com

Wahda, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: iwarasjid@gmail.com

Alimuddin, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: aan_alimuddin@yahoo.com

Andi Kusumawati, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: andiuma88@gmail.com

Sabir, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: sabirfeuh@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Nohong, M., Wahda, Nurqamar, I.F., Sanusi, A., Alimuddin, Kusumawati, A., & Sabir. (2021). Workshop Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Pendekatan Alternatif Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Panrita Abdi*, 5 (1), 110-114. DOI: <https://doi.org/10.20956/jpa.v5i1.2862>.